

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konseptual, istilah “pemberdayaan” berasal dari makna dasar "daya" yang mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang lain agar bertindak sesuai kehendaknya meskipun tindakan tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan atau keinginan mereka sendiri. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menghasilkan perubahan sosial yang menghasilkan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Aspek ekonomi, dan sosial termasuk kepercayaan diri, mata pencaharian, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, dan kemandirian untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Suharto, 2005:4).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor produksi, pengendalian distribusi dan pemasaran, pemberian upah yang layak kepada masyarakat, pemberian akses informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat. Upaya ini harus dilaksanakan dari berbagai perspektif, baik dari aspek kebijakan maupun aspek masyarakat (I Putu Gede Diamika, 2022:9).

Masyarakat sebagai pelaksana dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sosial, SDM, dan lingkungan alam yang dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan (Asyni Rahmasari & Indah Noviandari, 2024). Pengelolaan ekowisata mangrove yang baik tidak hanya mempertahankan lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem

mangrove. Pengembangan wisata hutan mangrove memanfaatkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang baru untuk memanfaatkan potensi wisata bahari (A. Rahman et al., 2023).

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengembangan potensi ekonomi desa yang memanfaatkan sumber daya lokal. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa, yang menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata daerah dilakukan melalui pengembangan potensi wisata secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Qanun ini juga menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat lokal, serta pelestarian lingkungan dan budaya daerah. Dengan adanya qanun tersebut, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata daerah, termasuk ekowisata mangrove di Gampong Kuala Langsa (Abdullah et al., 2023).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi wisata daerah, termasuk ekowisata. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi alam. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan masyarakat desa, di mana warga lokal menjadi subjek utama dalam kegiatan pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Hal ini dapat menciptakan peluang usaha baru dan lapangan pekerjaan kedepannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf perekonomian warga lokal. Langkah-langkah untuk mengoptimalkan potensi dari hutan mangrove ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu bentuk pemanfaatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dikembangkan adalah melalui ekowisata, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat lokal (Mukasyaf et al., 2024).

Ekowisata mangrove diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat menguntungkan dan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya mendorong terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan perkapita (Ramadhan et al., 2022). Salah satu provinsi yang memiliki hutan mangrove yang cukup luas terdapat di pesisir Timur Provinsi Aceh bertempat di Kota Langsa khususnya di Gampong Kuala. Hutan mangrove Kuala Langsa merupakan hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara dengan luas mencapai 8 ribu hektar (Sobari, 2022).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah wisatawan dalam negeri yang datang berkunjung ketempat wisata yang ada di Kota Langsa adalah sebanyak 296.829 orang. Hal ini membuktikan bahwa pada saat ini Kota Langsa sudah menjadi salah satu tujuan destinasi wisata.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Pada Objek Wisata Kota Langsa

Nama Objek Wisata	Desa	Kecamatan	Jumlah Pengunjung (Orang)
Hutan Mangrove	Kuala Langsa	Langsa Barat	72.913
Hutan Kota	Paya Bujok Seulemak	Langsa Baro	161.408
Mutiara Water Park	Gampong PB. Seuleumak	Langsa Baro	24.560

Virta Tirta Raya	Gampong PB. Beuramo	Langsa Barat	35.262
Museum Kota Langsa	Gampong Jawa	Langsa Kota	2.686

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

Kota Langsa memiliki objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di antaranya Hutan Mangrove. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan tertinggi yang berkunjung ke objek wisata di Kota Langsa adalah kunjungan ke Hutan Kota Langsa dan Hutan Mangrove dengan pengunjung lokal maupun mancanegara. Data ini membuktikan kawasan hutan mangrove Kuala Langsa sudah menjadi tujuan wisata andalan Kota Langsa, sebagai wisata edukasi mangrove yang berskala internasional. Hutan mangrove banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Kuala Langsa tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi pohon mangrove sendiri menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi sirup mangrove, keripik mangrove, selai mangrove serta aneka ragam kerajinan dari pohon mangrove (Safuridar & Andiny, 2020).

Ekowisata mangrove merupakan jasa lingkungan yang disajikan oleh hutan mangrove Kuala Langsa yang merupakan aset Pemerintah Kota (PEMKO) Langsa, dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Pelabuhan Kota Langsa atau disingkat dengan PEKOLA (perseroda) (Najmi et al., 2024). Kawasan ekowisata mangrove memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Jika dikelola dengan baik, kawasan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kuala Langsa serta menjadi sumber lapangan kerja dalam berbagai sektor usaha.

Pemerintah Kota Langsa kembali membuka destinasi wisata mangrove Kuala Langsa untuk umum setelah sempat tutup akibat pandemi. Pembukaan ini ditandai dengan meningkatnya antusiasme masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Bahkan, telah menambah fasilitas seperti jalur tracking, menara, dan perahu edukasi sebagai upaya menarik wisatawan dan mendukung ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata di Langsa terus mendapat perhatian, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi daerah (*Sumber : acehprov.go.id, 21 November 2025*).

Dalam kenyataannya, potensi ekowisata mangrove di Gampong Kuala Langsa belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat masih belum berjalan secara maksimal. Sekitar 14 pelaku usaha kuliner yang berjualan di sekitar kawasan wisata mengaku belum pernah menerima dukungan modal dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu, pendampingan pemerintah dalam membuka dan mengembangkan usaha juga belum dirasakan, baik dalam bentuk pelatihan ataupun pemanfaatan teknologi digital. Penguatan kelembagaan masyarakat melalui ekowisata mangrove belum berjalan. Serta kurangnya aktifnya kelembagaan atau kelompok usaha yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata. Hal ini terlihat dari masih dominannya mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan sehingga belum optimalnya pengembangan usaha, seperti usaha kuliner, kerajinan atau souvenir, maupun produk olahan khas mangrove. Ini menyebabkan potensi ekowisata mangrove sebagai sarana

pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian lokal belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekowisata dan pelaksanaan pemberdayaan oleh pemerintah. Meskipun ekowisata memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pemberdayaan belum berjalan sesuai harapan. Di perlukannya pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan kolabratif, dimana pemerintah Kota Langsa dan aparat gampong berperan aktif sebagai fasilitator dalam pemberdayaan melalui ekowisata mangrove. Ini diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Hal ini menjadi penting diteliti, karena pemberdayaan merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah melalui ekowisata mangrove agar mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Gampong Kuala Langsa serta faktor-faktor yang menghambatnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata mangrove di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata mangrove di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian supaya tidak mengalami terjadinya pelebaran yang dapat menyulitkan dalam pengumpulan data dilapangan, untuk itu perlu ditentukannya fokus penelitian yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata mangrove di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat pada aspek bantuan modal, bantuan prasarana, pendampingan, dan penguatan kelembagaan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata mangrove di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melalui ekowisata Mangrove di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat mengenai pemberdayaan masyarakat

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman ilmiah bagi mahasiswa, terutama mereka yang belajar Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, sebagai berikut :

a) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata, khususnya dalam ekowisata mangrove. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku yang terlibat dalam ekowisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan ekowisata mangrove. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan

inspirasi bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung peningkatan pendapatan.

c) Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan perbandingan dalam melakukan kajian serupa mengenai pemberdayaan masyarakat, pengelolaan wisata alam, dan peningkatan ekonomi lokal.